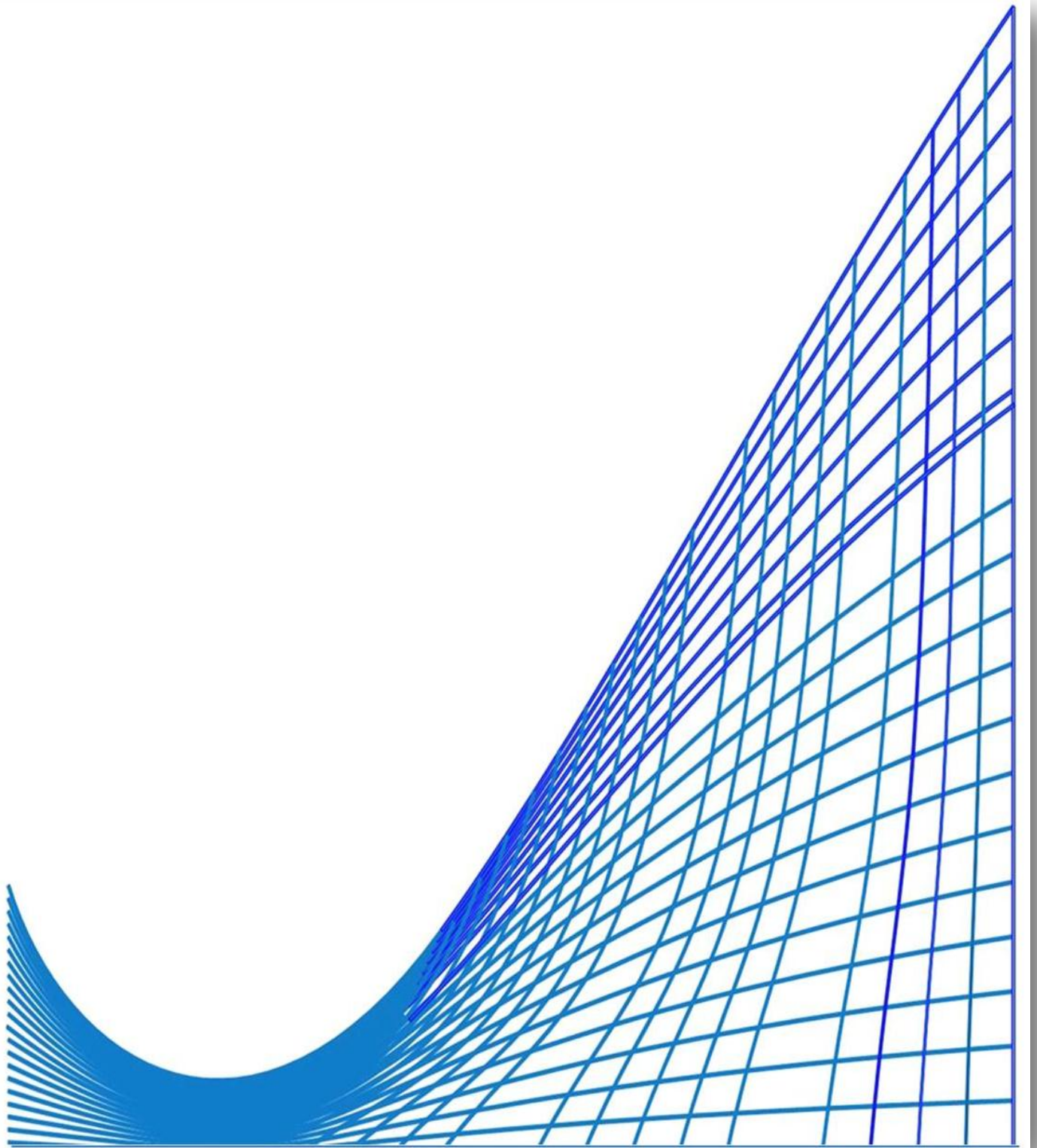




AMANISAL

JURNAL PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN



AMANISAL

Vol. 6

No. 2

Hal. 1-33

Ambon, November 2017

ISSN. 208-5109

POTENSI DAN BEBERAPA ASPEK EKONOMIS USAHA PERIKANAN DEMERSAL PADA PERAIRAN UTARA PULAU AMBON

Potency and Some Economic Aspects of Demersal Fisheries Business in The North Water of Ambon Island

Frederik W. Ayal

Jurusan/Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura
Korespondensi: F. W. Ayal, eddy.kakha@gmail.com

ABSTRACT

This research was aimed to assess the potential of demersal to rehabilitate and protect coral reef habitats. Some of the economic fisheries in the waters of the North of Ambon Island, and analyze the opportunities for demersal fisheries business economic development through the application of alternative fishing technologies. This research uses the interview and field survey approach. The results showed that the potential of demersal fish resources in the research area is still quite potential to be developed, although it needs to be followed by efforts aspects studied also showed that demersal fisheries business are promising to be developed to increase the income of demersal fishers in the area.

Keywords: potential, demersal fisheries, economic aspects, waters of North Ambon Island.

PENDAHULUAN

Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) yang tersebar di sekitar Provinsi Maluku meliputi WPP-714 (Laut Banda), WPP-715 (Laut Seram) dan WPP 718 (Laut Arafura), umumnya memiliki status tingkat eksploitasi cukup tinggi untuk berbagai kelompok sumber daya ikan (SDI), kecuali kelompok ikan demersal. Kondisi ini ditemukan pada tujuh WPP lain di Indonesia, sehingga permintaan terhadap SDI demersal sebagai alternatif mulai meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa perairan di Provinsi Maluku termasuk Gugus Pulau VII merupakan basis perikanan demersal tradisional. Pola pemanfaatannya mengindikasikan berbagai persoalan, antara lain: *pertama*, pemanfaatan masih menggunakan teknologi yang tradisional. *Kedua*, pemanfaatannya belum memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan. *Ketiga*, masyarakat nelayan yang mengusahakan perikanan demersal memiliki nilai tukar (NTN < 0,6). *Keempat*, perikanan demersal memiliki konektivitas dengan eksistensi ekosistem terumbu karang, namun kondisi ekosistem terumbu karang pada perairan ini dikategorikan baik hingga kurang baik (rusak). Tutupoho (2010) menyatakan kerusakan ini disebabkan karena operasi teknologi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

Kondisi tersebut di atas mendorong inisiasi pengembangan ekonomi perikanan pada wilayah perencanaan Gugus Pulau VII. Beberapa kawasan di wilayah perencanaan ini yang memiliki potensi perikanan demersal yang cukup kuat antara lain: perairan Utara Pulau Ambon, perairan pesisir Kecamatan Leitimur Selatan di Kota Ambon, Pulau Haruku, Pulau Saparua dan Pulau Nusalaut. Perikanan demersal pada perairan pantai Utara Pulau Ambon telah dikembangkan nelayan sejak lama, namun upaya pengembangan kapasitas ekonomi mereka melalui optimalisasi usaha masih relatif lemah.

Tupamahu *dkk* (2013) telah melakukan komparasi tiga tipe bubu gendang (Tipe A, B dan Tradisional) terhadap hasil tangkapan ikan target di perairan Utara Pulau Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bubu gendang Tipe A dan B lebih baik dibandingkan dengan bubu tradisional. Efektifitas and efisiensi pengujian alat tangkap ini tentunya akan lebih signifikan hasilnya apabila ditunjang dengan informasi aspek ekonomis nelayan dalam mengoperasikan alat tangkap tersebut. Hal ini dikarenakan hasil akhir dari introduksi teknologi baru

harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan nelayan tersebut.

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan utama pengembangan usaha perikanan demersal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi perikanan demersal pada perairan Utara Pulau Ambon, dan beberapa aspek ekonomis pengembangan usaha perikanan demersal melalui penerapan teknologi penangkapan ikan alternatif.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, mulai dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2015. Lokasi penelitian pada wilayah perencanaan Gugus Pulau VII, dan difokuskan salah satu kawasan utama perikanan demersal, pantai Utara Pulau Ambon.

Nelayan demersal yang menjadi target penelitian difokuskan pada salah satu pulau utama di pesisir Utara Pulau Ambon yaitu Pulau Ela. Masyarakat yang bermukim di Pulau Ela, sebagian besarnya merupakan nelayan demersal yang secara intensif melakukan penangkapan ikan demersal di sekitar perairan tempat mereka tinggal.

Pengambilan data lapangan dilakukan dalam bentuk wawancara dan survei lapangan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang berguna untuk mendisain percobaan. Data ini dibutuhkan untuk mendeskripsikan kondisi lokasi penelitian secara kualitatif. Pemilihan responden dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan pertimbangan bahwa responden benar-benar memahami permasalahan yang dianalisis. Responden dipilih dari nelayan bubu yang memahami dan mengoperasikan alat tangkap bubu tradisional. Peralatan yang digunakan untuk survei lapangan meliputi perahu motor tempel, *fish finder* Garmin 340C untuk mengidentifikasi potensi ikan demersal, GPS digunakan untuk menentukan posisi setiap pengoperasian bubu, peralatan

selam, *under water camera*, alat tulis menulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi

Kawasan Utara Pulau Ambon sebagai kawasan yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Secara astronomis kawasan ini terletak pada posisi 03°39'22,8" LS dan 127°58'44,8"BT. Batasan-batasan wilayahnya meliputi:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Ureng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Buru;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanjung Sial;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Ambon.

Sama halnya dengan kawasan lainnya di Maluku, kawasan ini juga beriklim laut tropis dan iklim musiman. Iklim ini dipengaruhi oleh angin musim (muson) yang bertiup selama (6) enam bulan silih berganti, dimana terjadi dua musim, yaitu musim timur yang dikenal dengan musim hujan dan berlangsung dari bulan Mei sampai Agustus, sedangkan musim barat (musim panas) berlangsung dari bulan November sampai bulan Maret. Bulan Maret dan November merupakan masa pancaroba (masa peralihan). Pengaruh musim turut mempengaruhi keadaan laut, karena musim Barat akan terlihat pada bagian Barat kawasan pesisir ini mengalami ombak yang besar (BPS, 2015).

Penelitian dilakukan pada salah satu pulau utama dimana masyarakatnya melakukan pemanfaatan sumber daya ikan demersal secara intensif, yakni Pulau Ela. Tipe pantai Pulau Ela adalah pasir berbatu pada zona pasang surut. Luas wilayah Pulau Ela adalah 42,61 Ha, dengan panjang pantai pasir putih mencapai 174,50 meter, lebar pantai pasir putih pada saat air pasang mencapai empat meter, lebar pantai pada saat air

surut sejauh tujuh meter. Pada kawasan ini juga ditemui satwa burung-burung laut. Vegetasi dominan yang ada di Pantai Pulau Ela adalah kelapa (*Cocos nucifera*), waru laut (*Hibiscus tiliaceus*), semak, serta rumput. Vegetasi lain yang ditemui adalah mangga (*Mangifera indica*).

Secara umum jumlah total penduduk yang bermukim di Pulau Ela pada tahun 2014, sebanyak 310 jiwa. Jumlah ini terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 158 orang (50,96%) dan penduduk perempuan sebanyak 152 orang (49,03%), yang terdistribusi ke dalam 69 Kepala Keluarga (KK). Masyarakat yang tinggal di Pulau Ela tidak semuanya adalah masyarakat Negeri Ureng tetapi ada sebagian besar yang merupakan pendatang dari suku Buton. Gambaran kondisi penduduk masyarakat Pulau Ela disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Penduduk Pulau Ela Berdasarkan Kelompok Umur.

No	Kelompok umur (Tahun)	Jumlah Jiwa	Proporsi (%)
1	0-5	38	12,25
2	6-13	73	23,54
3	14-20	59	19,03
4	21-45	105	33,87
5	46-59	15	4,83
6	60 ke atas	20	6,45

Sumber: Pemerintah Negeri Ureng Tahun 2014

Pada Tabel 1 tersebut juga terlihat bahwa kelompok umur dengan jumlah jiwa paling banyak yaitu pada kelompok umur 21-45 tahun dengan proporsi 33,87% (105 jiwa), diikuti oleh kelompok umur 6-13 tahun dengan proporsi 23,54% (73 jiwa). Sementara kelompok umur dengan jumlah jiwa paling sedikit yaitu 46-59 tahun dengan proporsi 4,83% (15 jiwa).

Tabel 1 terlihat bahwa penduduk usia produktif masih mendominasi distribusi penduduk di Pulau Ela. Kondisi ini dapat menjadi kekuatan atau kelemahan pembangunan kelautan dan perikanan kawasan ini. Apabila kelompok ini memiliki pemahaman, persepsi dan komitmen pembangunan secara berkelanjutan maka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan kawasan ini akan mampu menopang ekonomi masyarakat. Namun

apabila sebaliknya pemahaman, persepsi dan komitmen pembangunan secara berkelanjutan tidak dimiliki maka dikuatirkan akan berdampak pada sumber daya kelautan dan perikanan di sekitarnya.

Pendidikan merupakan pilar utama dalam suatu pembangunan terutama pembangunan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia. Pendidikan dapat menjadi jembatan dari ketertinggalan menuju kesuksesan. Tingkatan pendidikan juga dapat menjadi ukuran berhasil tidaknya pembangunan di suatu kawasan. Data dalam Tabel 2 menunjukkan distribusi penduduk Pulau Ela berdasarkan tingkatan pendidikan.

Tabel 2. Distribusi Penduduk Pulau Ela Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa	Proporsi (%)
1	Belum Sekolah	46	14,83
2	Tidak Sekolah	56	18,06
3	SD	152	49,03
4	SLTP	31	10
5	SLTA	24	7,74
6	Sarjana	1	0,32

Sumber: Pemerintah Negeri Ureng Tahun 2014

Proporsi penduduk dengan tingkat Pendidikan Sarjana masih sangat kecil yaitu 0,32% (satu jiwa) dan lulusan SMA juga masih sangat sedikit yaitu 7,74% (24 jiwa). Sementara tingkatan Pendidikan dengan proporsi paling banyak yaitu SD sebanyak 49,03% (152 jiwa). Tingkatan pendidikan juga berhubungan dengan tingkat pemahaman serta kapasitas informasi dan pengetahuan yang diserap seseorang. Semakin tinggi tingkatan pendidikan seseorang seharusnya berdampak pada semakin besarnya kapasitas informasi dan pengetahuan yang diserapnya, dalam hal ini yang berkaitan dengan sumber daya kelautan dan perikanan. Pendidikan yang dimaksudkan di atas adalah pendidikan formal.

Tingkat pendidikan formal (Tabel 2) terlihat bahwa untuk jenjang SMA keatas masih di bawah 10% maka untuk meningkatkan kapasitas informasi dan

pengetahuan masyarakat Pulau Ela dapat dikolaborasikan antara pengembangan pendidikan non formal (melalui pelatihan, lokakarya dan penyuluhan kepada masyarakat) dengan penguatan/soliditas kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Coombs *dkk* (1985) berpendapat bahwa pendidikan non formal merupakan setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir dan diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajar. Sanapiah (1981) menyatakan bahwa program pendidikan non formal berisikan muatan-muatan yang berhubungan dengan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan (*income generating skill*), berhubungan dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dimaksudkan sebagai bekal kerja, bekal mendapatkan pendapatan seperti perikanan, pertanian, perkebunan dan lainnya.

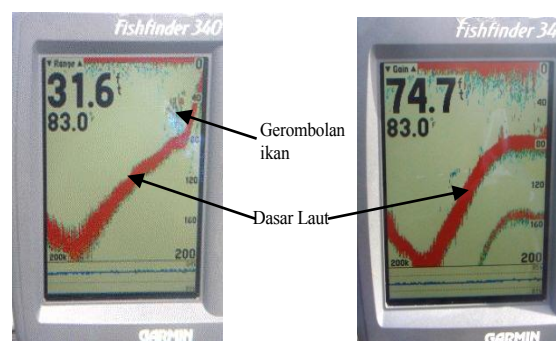
2. Potensi Terumbu Karang, Ikan Karang dan Ikan Demersal

Hasil pengamatan kondisi terumbu karang pada perairan sekitar Pulau Ela menunjukkan, persentase penutupan karang yang paling tinggi terdapat di Stasiun 2 sebesar 50,48%, selanjutnya di stasiun pengamatan 1 sebesar 21,96% dan stasiun pengamatan 3 sebesar 20,30%. Sesuai dengan kriteria penilaian kondisi ekosistem terumbu karang, persentase penutupan karang hidup di Pulau Ela berdasarkan kategori kondisi terumbu karang, termasuk kategori Jelek (*Poor*) dan Cukup (*Fair*).

Kondisi terumbu karang yang diteliti berada pada kategori Jelek (*Poor*) dan Cukup (*Fair*), dikarenakan aktivitas kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti kegiatan penangkapan ikan dan biota lainnya dengan bahan peledak, buangan jangkar dan penarikan rangka kapal (Tutupoho, 2010). Sejak diteliti Tutupoho (2010), kondisi yang masih sama juga ditemukan dalam penelitian saat ini. Hal ini dikarenakan karang merupakan koloni

hewan yang tumbuh relatif lambat, dengan laju pertumbuhan berkisar dari 0,1 sampai 10 cm tingginya per tahun (Clark, 1995). Sedangkan menurut Warner (1984), laju pertumbuhan rata-rata karang adalah 1 mm per tahun. Sementara itu, kalsifikasi terumbu pada perairan dangkal (0-10 m) berkisar 4-15 kg CaCO₃/m²/tahun.

Jumlah spesies ikan karang yang ditemukan di perairan sekitar Pulau Ela mencapai 148 spesies ikan karang dan demersal, yang dikelompokkan ke dalam 74 genera dan 29 famili. Sementara untuk kepadatan ikan karang dan demersal ditemukan bahwa rata-rata kepadatan ikan karang dan demersal pada perairan ini berkisar 6,71 ind/m². Kondisi ini tidak terlalu jauh berbeda dengan yang ditemukan hasil deteksi *fish finder* pada lokasi-lokasi tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Echogram yang Menunjukkan Profil Dasar Laut dan Keberadaan Ikan pada Lokasi-Lokasi Pemasangan Bubu Tradisional Nelayan Assilulu.

Echogram fish finder (Gambar 1) secara kualitatif memperlihatkan gerombolan ikan pada lokasi-lokasi pemasangan bubu tradisional nelayan pantai Utara Pulau Ambon jauh lebih kecil dan jarang dibandingkan dengan lokasi-lokasi yang belum dilakukan pemasangan bubu oleh mereka dimana gerombolan ikan jauh lebih besar dan lebih padat. Kepadatan gerombolan ikan ditunjukkan oleh pekatnya warna merah pada gerombolan ikan tersebut.

Tabel 3. Komposisi Terumbu Karang di Perairan Sekitar Pulau Ela

Kategori Bentuk Pertumbuhan Bentik	Kode	St. 1	St. 2	St. 3
		% Tutupan	% Tutupan	% Tutupan
HARD CORALS		21.96	50.48	20.30
Acropora				
Branching	ACB	0.00	0.36	0.00
Encrusting	ACE	0.00	0.00	0.00
Submassive	ACS	11.56	1.78	15.10
Digitate	ACD	0.00	0.00	0.00
Tabulate	ACT	0.00	0.00	0.00
Non Acropora				
Branching	CB	0.00	0.00	0.00
Encrusting	CE	2.42	2.76	2.38
Foliose	CF	0.96	0.00	0.40
Massive	CM	7.02	15.64	2.42
Submassive	CS	0.00	29.94	0.00
Mushroom	CMR	0.00	0.00	0.00
<i>Millepora</i>	CME	0.00	0.00	0.00
<i>Heliopora</i>	CHL	0.00	0.00	0.00
Dead Corals				
Dead Corals	DC	0.00	0.00	0.00
Dead Coralswith Algae	DCA	0.62	0.84	0.80
Algae				
Algal Assemblage	AA	0.00	0.00	0.00
Coralline Algae	CA	0.00	0.00	0.00
<i>Halimeda</i>	HA	0.00	0.00	0.00
Macroalgae	MA	0.00	0.00	0.00
Turf Algae	TA	0.00	0.00	0.00
Other Fauna				
Soft Coral	SC	6.20	8.40	0.68
Sponges	SP	0.34	0.60	0.90
Zoanthids	ZO	0.00	0.00	0.00
Others	OT	0.00	0.00	0.00
Abiotic				
Sand	S	5.36	11.90	6.92
Rubble	R	28.36	18.94	70.40
Silt	SI	0.00	0.00	0.00
Water	WA	0.00	0.00	0.00
Rock	RCK	37.16	8.84	0.00

Jumlah spesies ikan karang yang ditemukan di perairan sekitar Pulau Ela mencapai 148 spesies ikan karang dan demersal, yang dikelompokkan ke dalam 74 genera dan 29 famili. Sementara untuk kepadatan ikan karang dan demersal ditemukan bahwa rata-rata kepadatan ikan karang dan demersal pada perairan ini berkisar 6,71 ind/m². Kondisi ini tidak terlalu jauh berbeda dengan yang ditemukan Tutupoho (2010).

Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata kedalaman dimana teridentifikasi potensi ikan demersal adalah antara kedalaman 20 meter sampai dengan 60 meter. Dengan demikian, kedalaman potensial untuk penangkapan ikan dapat diketahui untuk membantu operasionalisasi alat tangkap bubu.

3. Beberapa Aspek Ekonomis Pengembangan Usaha Perikanan Demersal

3.1. Modal Usaha

Pemilik suatu usaha penangkapan ikan pada umumnya menggunakan investasi awal yang berbeda-beda pada saat memulai usahanya dan investasi awalnya merupakan modal usaha. Modal usaha sangat penting dalam memulai suatu usaha penangkapan dan intensitasnya sangat tinggi. Usaha penangkapan bubu termasuk salah satu usaha yang membutuhkan modal kerja yang cukup besar. Modal usaha bubu sangat bergantung pada kapan usaha dimulai dan besarnya unit usaha. Dalam menjalankan usaha bubu, dibutuhkan biaya sebesar Rp.7.543.569. Untuk jenis barang modal membutuhkan dana cukup besar untuk mesin penggerak dengan nilai Rp.3.000.000 atau (39,77%). Jenis barang modal yang membutuhkan dana yang kecil adalah tali nilon dengan nilai sebesar Rp.279.285 atau (3,70%). Penggunaan barang modal untuk usaha bubu dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Penggunaan Barang Modal Usaha Bubu

No	Jenis Barang Modal	Jumlah (Unit)	Spesifikasi	Harga (Rp)	(%)
1	Perahu	1	Kayu	2.842.857	37,69
2	Mesin	1	Honda	3.000.000	39,77
3	Bubu	7-10	Bambu	857.142	11,36
4	Tali	6-10	Nilon	279.285	3,70
5	Lain-lain	(kg)/1bal	-	564.285	7,48
Total Rata-rata				7.543.569	100

3.2. Biaya Usaha

Biaya dalam ekonomi mencerminkan efisien tidaknya sistem produksi, sehingga

konsep biaya juga mengacu kepada konsep produksi. Dalam konsep produksi kita membicarakan penggunaan input secara fisik dalam menghasilkan output atau produksi. Sementara dalam konsep biaya kita menghitung penggunaan input itu dari nilai ekonomi yang disebut biaya. Menurut Gasperz (2002) dikutip oleh Payapo (2010), pada dasarnya biaya yang diperhitungkan dalam produksi suatu usaha adalah biaya tetap (*Fixed Cost*) dan biaya variabel (*Variabel Cost*).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa biaya yang dikeluarkan nelayan bubu adalah biaya tetap dan biaya variabel. Untuk lebih jelasnya rata-rata biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan nelayan bubu dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Komponen Biaya Tetap Usaha Bubu

No	Komponen Biaya	Rata-rata Biaya Tetap (Rp)	Presentase (%)
1	Penyusutan	311.430	4,91
2	Perawatan	4.828.571	76,16
3	Administrasi	1.200.000	18,93
Total Rata-rata		6.340.000	100

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa rata-rata biaya tetap usaha bubu terdiri dari biaya penyusutan dengan nilai sebesar Rp.311.430 atau (4,91%) biaya perawatan dengan nilai Rp.4.828.571 atau (76,16%), biaya administrasi dengan nilai sebesar Rp.1.200.000 atau (18,93%) dan total biaya tetap adalah Rp.6.340.000.

Biaya variabel (*variable cost*) yang dikeluarkan responden terdiri dari biaya ransum dan biaya pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak). Biasanya satu unit alat tangkap bubu terdiri dari dua sampai tiga orang sehingga biaya ransum ditanggung masing-masing responden, sedangkan biaya BBM ditanggung oleh pemilik usaha. Rata-rata biaya ransum yang dikeluarkan responden sebesar Rp.5.542.999 atau (77,38%), dan rata-rata biaya BBM yang dikeluarkan sebesar Rp.1.619.999, atau (22,62%) dengan total biaya variabel adalah Rp.7.162.999 (Tabel 6).

Tabel 6. Komponen Biaya Variabel Usaha Bubu

No	Komponen Biaya	Rata-rata Biaya Variabel	Presentase (%)
1	Ransum	5.542.999	77,38
2	BBM	1.619.999	22,62
Total Rata-rata		7.162.999	100

3.3. Pendapatan Usaha

Setiap kegiatan bisnis, tujuannya adalah memperoleh keuntungan, begitupula dengan tujuan operasi penangkapan ikan. Setiap pengusaha menghendaki pendapatan dari penjualan hasil tangkapan akan melebihi biaya operasi (Mantjoro, 2010). Dengan demikian pendapatan bersih merupakan selisih antara nilai penerimaan dengan pengeluaran atau total biaya yang dikeluarkan (biaya tetap ditambah biaya variabel).

Rata-rata trip tangkapan pada bulan April, Mei, Oktober dan November (musim ikan) lebih banyak dari pada bulan-bulan lainnya (musim kurang ikan) dengan total trip tangkapan adalah 140 trip per tahun (Tabel 7).

Tabel 7. Rata-rata Trip Penangkapan, Produksi dan Harga Jual pada Usaha Bubu

Bulan	Rata-rata Trip/Bulan	Rata-rata Produksi (kg)	Rata-rata Harga Jual (Rp)
Januari	10	15	20.000
Februari	9	15	20.000
Maret	10	15	20.000
April	12	20	15.000
Mei	12	20	15.000
Juni	11	15	20.000
Juli	11	15	20.000
Agustus	11	15	20.000
September	11	15	20.000
Oktober	12	20	15.000
November	12	20	15.000
Desember	9	15	20.000
Total	140	200	220.000

Hal ini dapat mempengaruhi hasil produksi sehingga pada musim ikan lebih besar dari musim kurang ikan. Rata-rata produksi yang diperoleh nelayan bubu per bulan pada musim ikan adalah sebesar 20 kg dan musim kurang ikan adalah sebesar

15 kg dengan total produksi sebesar 200 kg.

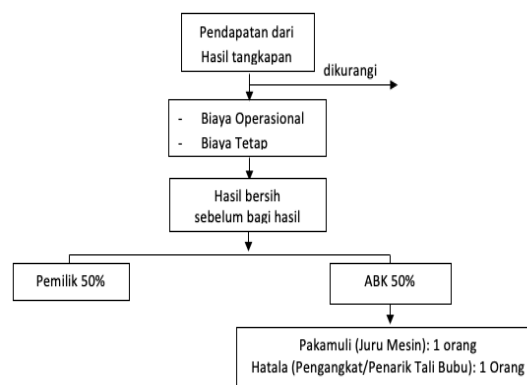
Hasil tangkapan pada nelayan bubu pada musim ikan dijual ke pasar Batu Merah atau pasar Mardika dengan harga rata-rata Rp.15.000. Hasil tangkapan pada musim kurang ikan dijual ke pengumpul di dusun Waipula dengan harga rata-rata Rp.20.000. Secara matematis, penerimaan diperoleh dari produksi tangkapan (Y) dikalikan dengan harga jual. Dengan demikian nilai total penerimaan nelayan bubu adalah sebesar Rp.39.000.000.

Pendapatan usaha merupakan selisih antara penerimaan total ($TR = \text{total revenue}$) dengan biaya total ($TC = \text{total cost}$). Total pendapatan diterima nelayan bubu adalah sebesar Rp.25.496.998.

3.4. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil dalam usaha perikanan khususnya usaha perikanan tangkap terjadi karena adanya pemanfaatan faktor produksi (modal dan tenaga kerja) dari sudut pandang nelayan pemilik (*pakamena*) dan sudut pandang ABK (*hatala/pakamuli*). Sistem bagi hasil perikanan yaitu pembagian hasil penjualan ikan setelah dilakukan berbagai pemotongan atas biaya BBM, retribusi, dan upah ABK (*hatala/pakamuli*) yang dilakukan atas kesepakatan bersama antara nelayan pemilik (*pakamena*) dan ABK (*hatala/pakamuli*) lainnya. Sistem bagi hasil perikanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan.

Pendapatan dalam usaha bubu meliputi pendapatan pemilik (*pakamena*) dan pendapatan ABK (*hatala/pakamuli*) yang diperoleh dari pendapatan bersih sesuai sistem bagi hasil yang disepakati bersama. Pada prinsipnya pembagian hasil terhadap ABK (*hatala/pakamuli*) nelayan bubu adalah dalam bentuk uang yang merupakan penjualan dari hasil tangkapan setelah dikurangi dengan biaya tetap dan biaya variabel (Gambar 2).



Gambar 2. Sistem Bagi Hasil Nelayan Bubu

Sistem bagi hasil yang berlaku adalah pemilik (*pakamena*) 50% dan ABK (*hatala/pakamuli*) 50%. Bagian dari anggota nelayan kemudian dibagi dua yakni juru mesin (*pakamuli*) dan pengangkat/penarik tali bubu (*hatala*). Prosentase bagi hasil ini memang sudah sesuai dengan Undang-Undang Bagi Hasil Nomor 16 Tahun 1964. Undang-undang ini mengatur pembagian yang seimbang antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap dan menyatakan bahwa untuk perahu motor, minimal 40% dari hasil bersih untuk nelayan penggarap. Nilai di atas bahkan sudah melebihi 40%.

3.5. Pendapatan Pemilik dan ABK

Pendapatan merupakan unsur kesejahteraan manusia yang sangat mempengaruhi tingkat kecukupan kebutuhan dasar. Pendapatan nelayan pemilik maupun ABK dalam suatu usaha penangkapan ikan sangat tergantung dari produksi dan system bagi hasil yang diterapkan. Pendapatan nelayan bubu diperoleh dengan mengurangi total penerimaan dengan total pengeluaran (biaya tetap dan biaya variabel).

Hasil lapangan menunjukkan pendapatan usaha nelayan bubu sebesar Rp.25.496.998 dengan persentase bagi hasil 50% : 50%, maka pendapatan pemilik (*pakamena*) adalah sebesar Rp.12.748.499 (Tabel 8). Selanjutnya pendapatan dari ABK di bagi 2 dengan persentase bagi hasil 25% : 25% yaitu

masing-masing menerima Rp.6.036.749,5. Pendapatan nelayan pemilik diperoleh dari total pendapatan usaha dibagi 2 (dua). Pendapatan masing-masing responden ABK (*hatala/pakamuli*) diperoleh dari pendapatan ABK dibagi 2 (dua).

Tabel 8. Pendapatan Nelayan Bubu dengan Berbagai Sistem Bagi Hasil Untuk ABK

No	Uraian	Sistem Bagi Hasil
I	Pendapatan (Rp)	25.496.998
II	Prosentase Bagi Hasil	50% : 50%
1	Pendapatan pemilik (Rp)	12.748.499
2	ABK (Rp)	12.073.499
III	Prosentase Bagi Hasil untuk Anggota Nelayan	25% : 25%
1	Juru mesin (pakamuli) (Rp)	6.036.749,5
2	Penarik tali bubu (<i>hatala</i>) (Rp)	6.374.249,5

Data-data yang tertera pada tabel menunjukkan pendapatan usaha nelayan bubu Rp.25.496.998 dengan persentase bagi hasil 50% : 50%, maka pendapatan pemilik (*pakamena*) adalah sebesar Rp.12.748.499. Selanjutnya pendapatan dari ABK di bagi 2 dengan persentase bagi hasil 25% : 25% yaitu masing-masing menerima Rp.6.036.749,5. Pendapatan nelayan pemilik diperoleh dari total pendapatan usaha dibagi 2 (dua). Sedangkan pendapatan masing-masing responden ABK (*hatala/pakamuli*) diperoleh dari pendapatan ABK dibagi 2 (dua). Nilai ini sudah berada di atas UMP Maluku tahun 2017 yang adalah sebesar Rp. 1.925.000 sesuai Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 368 Tahun 2016.

KESIMPULAN

Potensi sumberdaya ikan demersal pada wilayah penelitian masih cukup potensial untuk dikembangkan, walaupun perlu diikuti dengan upaya-upaya rehabilitasi dan perlindungan habitat terumbu karang. Beberapa aspek ekonomis yang diteliti juga menunjukkan bahwa usaha perikanan demersal

menjanjikan untuk dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan nelayan perikanan demersal di wilayah ini.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. S. Tubalawony, Dr. J. Abrahamsz dan Dr. Y. Lopulalan yang telah berkontribusi dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Clark JR. 1995. Coastal Zone Management Handbook. Lewis Publishers. Boca Raton, New York, London, Tokyo.
- Coombs P, Ahmed H dan Manzcor. 1985. Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non-Formal. CV Rajawali, Jakarta.
- Lembar Negara No 97. 1964. Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. LN 1985 No 46: Penjelasan Tambahan Lembar Negara No 2690.
- Sanapiah F. 1981. Pendidikan Luar Sekolah (Di Dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan Nasional). Usana Offset Printing, Surabaya.
- Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 368 Tahun 2016. Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Sektoral/Sub Sektoral Provinsi Maluku Tahun 2017.
- Tupamahu A, Jais E, Matakupan H dan Siahainenia SR. 2013. Komparasi Perbedaan Tiga Tipe Bubu Gendang Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Target di Perairan Pulau Ambon. Artikel. Jurnal Amanisal PSP FPIK Unpatti-Ambon. Volume 2 Nomor 2, Ambon. Halaman 10-18.
- Tutupoho MH. 2010. Analisis Kesesuaian Wisata Bahari Gugus Pulau VII. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura. Ambon.
- Warner GF. 1984. Diving and Marine Biology, The Ecology of the Sublittoral. Cambridge University Press. Cambridge.